

PENCAPAIAN RAD SDGs 2022-2026

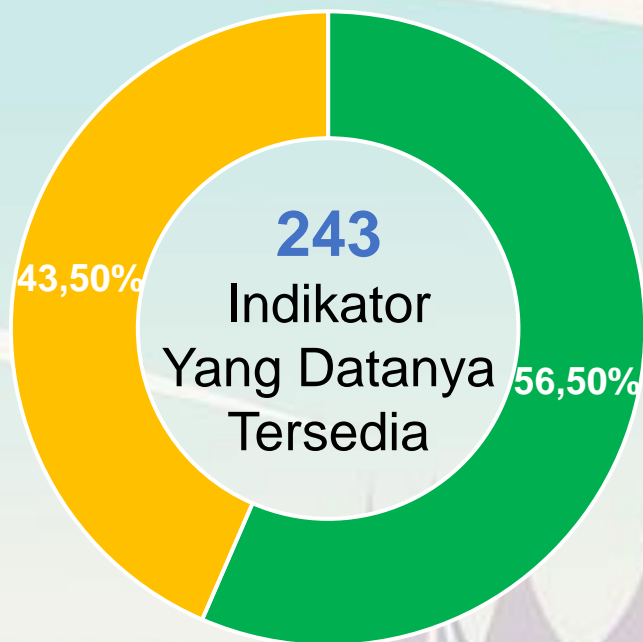
DISAMPAIKAN PADA ACARA

**DESK SDGs MUSRENBANGNAS
TAHUN 2024**

- 7 APRIL 2024 -

OVERVIEW PENCAPAIAN SDGs TAHUN 2023

Overview Capaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



■ Tercapai ■ Akan Tercapai

PILAR SOSIAL

(66 indikator tersedia datanya
dari 21 indikator)

56,29%

43,71%

PILAR EKONOMI

(81 indikator tersedia datanya
dari 8 indikator)

48,35%

51,65%

PILAR LINGKUNGAN

(73 indikator tersedia datanya
dari 4 indikator)

48,12%

51,88%

PILAR HUKUM & TATA KELOLA

(73 indikator tersedia datanya
dari 4 indikator)

80,25%

19,75%

- Dari 243 indikator yang dilaporkan sementara sampai dengan keadaan November 2023 didapat bahwa **sebagian besar 56,50% telah tercapai.**
- Kemajuan yang cukup baik dapat dilihat pada **Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola**

46 dari 289 indikator pada metadata edisi II, datanya tidak/belum tersedia sehingga **perlu penguatan upaya penyediaan data**

Overview Capaian RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

PILAR	TUJUAN	INDIKATOR (METADATA EDISI II)	BELUM TERSEDIA PADA RPJMD 2021-2026	KESELARASAN DENGAN INDIKATOR RPJMD 2021-2026		
				TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	JUMLAH INDIKATOR
Pembangunan Sosial	Tujuan 1	14	3	70	54	124
	Tujuan 2	16	11	44	13	57
	Tujuan 3	31	5	23	30	53
	Tujuan 4	14	1	29	16	45
	Tujuan 5	12	1	13	3	16
Pembangunan Ekonomi	Tujuan 7	7	0	3	6	9
	Tujuan 8	19	5	12	14	26
	Tujuan 9	21	0	9	9	18
	Tujuan 10	17	3	5	1	6
	Tujuan 17	25	0	15	9	24
Pembangunan Lingkungan	Tujuan 6	10	0	12	14	26
	Tujuan 11	17	3	20	11	31
	Tujuan 12	17	1	11	22	33
	Tujuan 13	9	0	6	3	9
	Tujuan 14	10	0	4	14	18
	Tujuan 15	14	0	11	0	11
Pembangunan Hukum Dan Tata Kelola	Tujuan 16	36	13	65	16	81
	Total	289	46	352	222	574

PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT PENCAPAIAN SDGs

PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT PADA PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

No	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT	PERANGKAT DAERAH
1	Masih tinggi capaian prevalensi stunting yakni 23,6%	<ol style="list-style-type: none"> 1. optimalisasi Aksi Konvergensi 2. Intervensi gizi spesifik pada Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan 3. Intervensi gizi sensitif pada Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 	Lintas SKPD
2	Belum optimalnya pencapaian Umur Harapan Hidup sebesar 74,14 Tahun dalam mendukung tujuan kehidupan sehat sejahtera	Optimalisasi Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup dan intervensi secara kontinue (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif	Dinas Kesehatan
3	Terbatasnya pemenuhan layanan dasar dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dalam dan luar Panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Penambahan menu DAU Peruntukkan 3. Memastikan sasaran terdapat dalam DTKS 	Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial
4	Masih minimnya orang yang tertular HIV/AIDS yang terjaring dibandingkan prediksi jumlah penderita HIV/AIDS di Sumatera Barat yang tertular virus HIV.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama Remaja melalui edukasi dini terkait dengan HIV/AIDS mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya 2. Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga sebagai bentuk pencegahan terjadinya HIV/AIDS 	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Kominfotik

PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT PADA PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

No	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT	PERANGKAT DAERAH
1	Masih rendahnya capaian PDRB perkapita pada tahun 2023 sebesar Rp.54,33 juta	Peningkatan daya saing dan produktifitas tenaga kerja terutama pada sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan	Disnakertrans, Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, DKP, Dishut, Dinas Peternakan, Disperindag
2	Masih tingginya capaian Tingkat Pengangguran pada Tahun 2023 sebesar 5,94% dibandingkan nasional 5,32%	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta berbasiskan potensi daerah	Disnakertrans
3	Belum maksimalnya kondisi mantap jalan provinsi pada tahun 2023 dengan capaian 71,72% (ruas jalan Provnsi : 1.608,57 Km)	Peningkatan kapasitas jalan, pengendalian dan pembatasan jalan bagi Kendaraan yang melewati batas kapasitas jalan	Dinas BMCKTR, Dinas Perhubungan
4	Masih tingginya tingkat kemiskinan pada daerah tertinggal (Kabupaten Kepulauan Mentawai) pada tahun 2023 sebesar : 13,76%	Pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat Desil 1 Pemberdayaan masyarakat serta peningkatan akses ekonomi pada masyarakat Desil 2 dan 3	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi dan Disperindag

PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT PADA PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

No	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT	PERANGKAT DAERAH
1	Belum tersedianya Layanan Limbah Domestik oleh SPALD Regional	Pembangunan SPALD Regional	Dinas BMCKTR
2	Masih rendahnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 sebesar 75,80	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemulihan sungai yang dilakukan secara terpadu baik oleh pemerintah pusat provinsi dan kab/kota 2. Meningkatkan cakupan Program/ kegiatan pemulihan/ rehabilitasi lahan yang selama ini tidak sebanding dengan laju penurunan tutupan lahan 3. Pelibatan peran serta masyarakat disekitar hutan dalam menjaga dan memanfaatkan hutan berbasis nagari mengatasi kekurangan tenaga polisi kehutanan 	Dinas LH, Dinas Kehutanan
3	Belum maksimalnya penanganan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 2. Edukasi secara intens kepada masyarakat 3. Peningkatan kapasitas TPA Regional secara terpadu antara Provinsi dan Kabupaten/Kota 	Dinas LH, Dinas BMCKTR
4	Belum maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi Lahan kritis	Melakukan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan secara intens	Dinas Kehutanan

PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT PADA PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA

No	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT	PERANGKAT DAERAH
1	Belum maksimalnya capaian SAKIP (Tahun 2023 dengan predikat BB, 78,34) dan Indeks RB (Tahun 2023 dengan predikat BB, 76,25)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 	Biro Organisasi, Inspektorat
2	Belum maksimalnya nilai SPBE, pada tahun 2023 dengan capaian 3,75	Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Masih rendahnya capaian perempuan di legislatif (10,77%) dan Perempuan sebagai pengambil kebijakan (21,15)	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan guna peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
4	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan rasio kekerasan terhadap anak yang masih relatif tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada setiap kab/kota 2. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan dan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak 	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN SDGs

MAPPING INDIKATOR SDGs DENGAN RPJMD 2021-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR SDGs	RPJMD 2021-2026					
			MAKRO	IKU	IKD	PROGRAM	PROGUL	JUMLAH
1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	14	6	18	42	23	38	127
2	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	16	-	16	12	5	36	69
3	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	31	-	1	23	31	3	58
4	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	14	-	4	9	6	27	46
5	Tujuan 5 Kesenjaraan Gender	12	-	-	12	6	-	18
6	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	10	-	4	10	8	4	26
7	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	7	-	-	5	4	-	9
8	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	19	4	4	7	4	12	31
9	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	21	-	4	4	2	8	18
10	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	17	2	-	5	2	-	9
11	Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	17	1	7	18	6	3	35
12	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	17	-	1	10	14	9	34
13	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	9	-	-	5	3	1	9
14	Tujuan 14 Ekosistem Lautan	10	-	-	3	22	1	26
15	Tujuan 15 Ekosistem Daratan	14	-	-	5	8	-	13
16	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	36	-	14	32	30	5	81
17	Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	25	-	3	15	10	-	28
	Jumlah	289	13	76	217	184	147	637

ARAH KEBIJAKAN UTAMA PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SDGs PROV SUMATERA BARAT

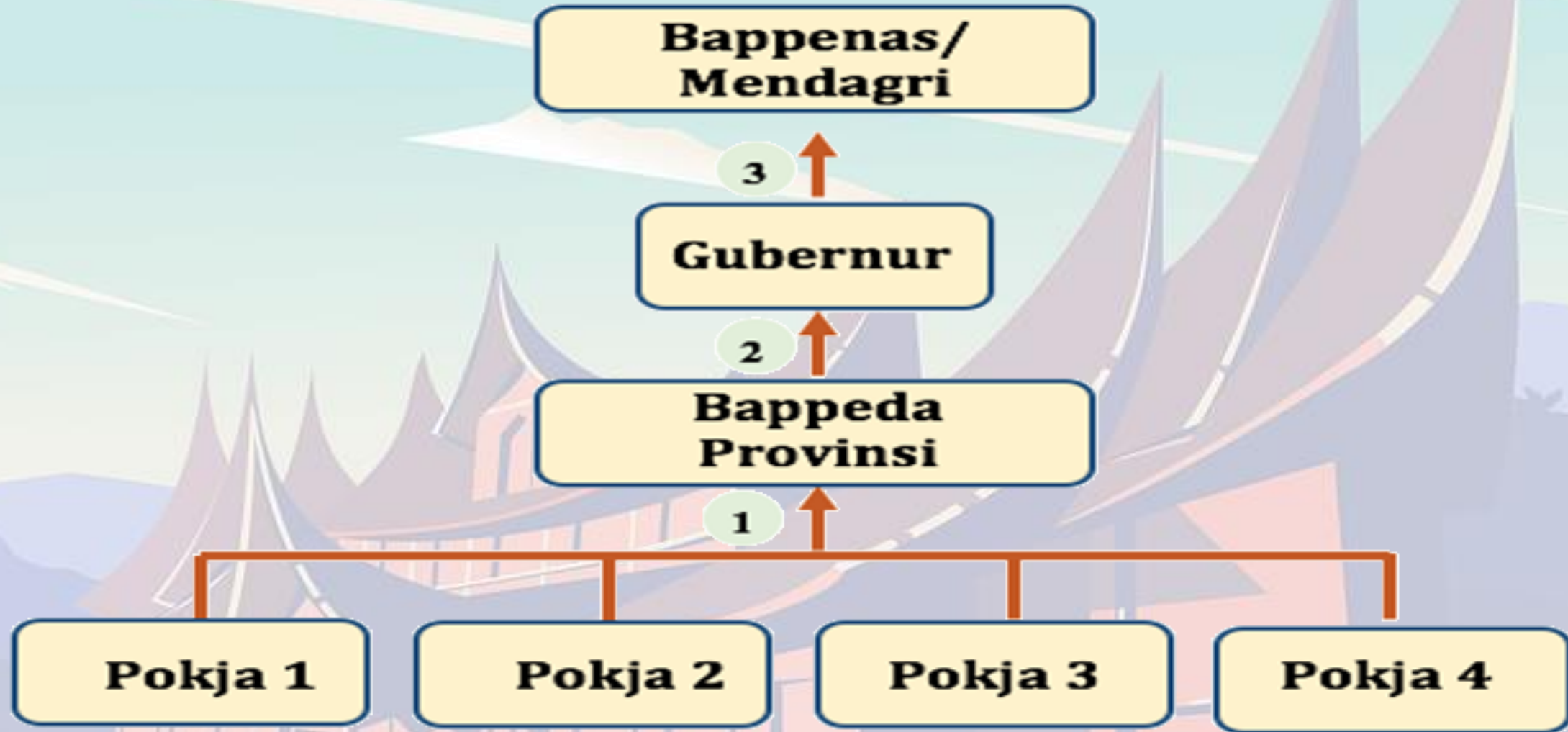
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021-2026

PRIORITAS



PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SDGs

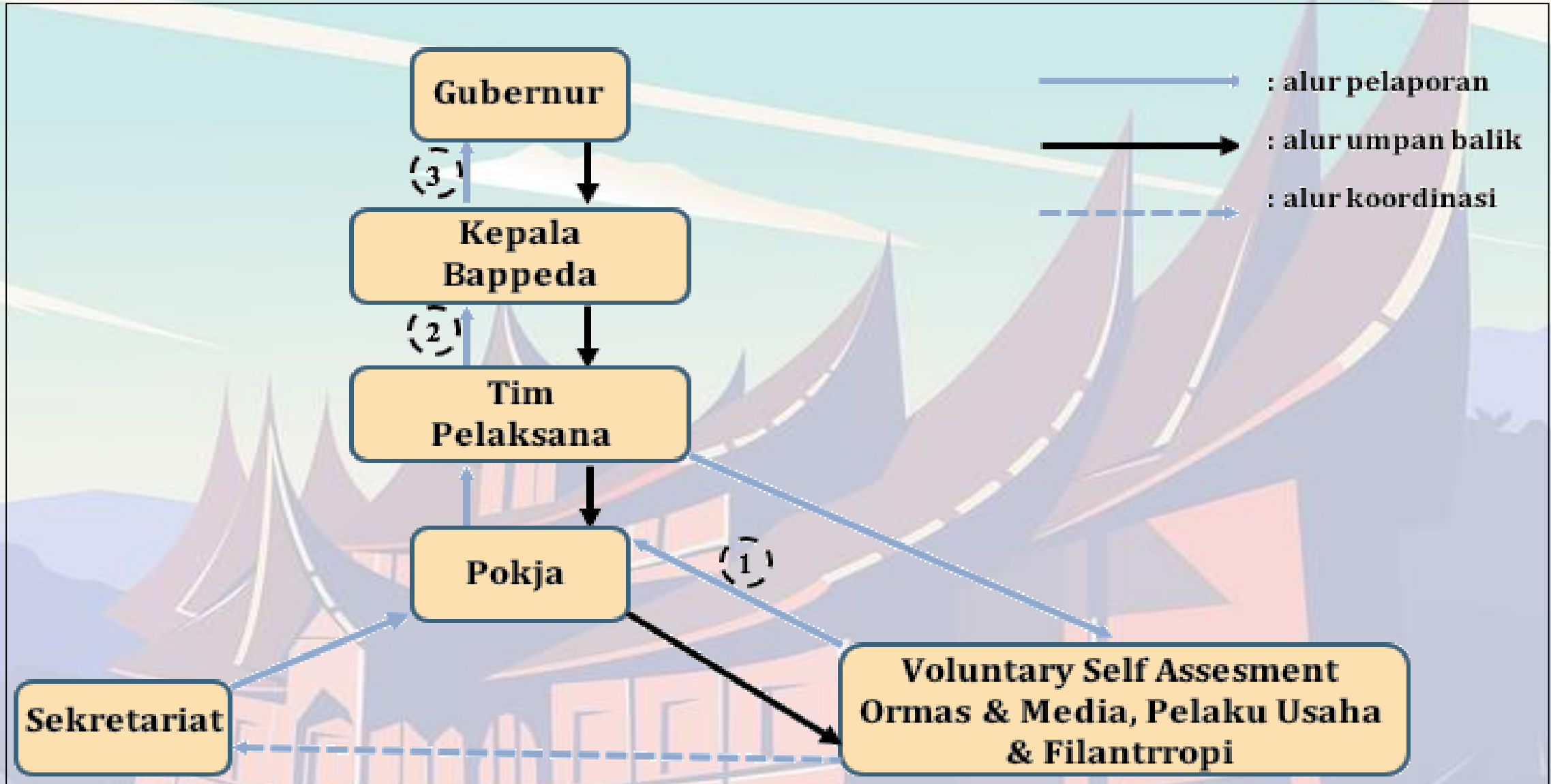
Alur Informasi untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat



MEKANISME EVALUASI RAD TPB PROVINSI SUMATERA BARAT



Alur Informasi Evaluasi untuk RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Non-Pemerintah



PARTISIPASI DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

4 PLATFORM PEMANGKU KEPENTINGAN SDGs

PEMERINTAH	LSM DAN MEDIA		FILANTROPI DAN BISNIS	AKADEMISI
1. Pemerintah Provinsi → didampingi GIZ	1. HWDI Sumbar	10. AIMI	1. BAZDA Prov. Sumbar	1. SDGs Center UNAND
2. Pemerintah Kabupaten/ Kota	2. PKBI	11. Yayasan Senarai	2. Dompot Dhuafa SINGGALANG	2. SDGs Center UNP
	3. Langkah Kami Untuk Kita	12. Gerkatin	3. Inisiatif Zakat Indonesia	3. Fisipol Univ, Muhammadiyah Sumbar
	4. FPRB Sumbar	13. Nurani Perempuan	4. Laziz Mitra Ummat Madani	4. UIN Imam Bonjol
	5. WCC Nurani Perempuan	14. Gugah Nurasi Indonesia	5. ISMI (Ikatan Saudagar Muslim Indonesia) Sumbar	5. American Corner UNAND
	6. LP2M Sumbar	15. Koperasi Mandiri Dan Merdeka	6. KADIN Sumbar	6. AIESEC UNAND
	7. Kahmi Kota Payakumbuh	16. Jemari Sakato		
	8. Kahmi 50 Kota	17. Infosumbar.com		
	9. Pambangkik Batang Tarandam	18. Padangmedia.com		
		19. Langgam.id		

SINERGITAS STATE ACTOR DAN NON STATE ACTOR DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM SDG'S

1. Forum Sinergitas :

- Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 (Konsultasi Publik dan Musrenbang)
- Penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 (Konsultasi Publik)
- Penyusunan RKPD (Konsultasi Publik dan Musrebang)
- Penyusunan RAD SDGs Tahun 2022-2026
- Monev dan Pelaporan

2. Implementasi :

- Saling berkoordinasi antara State actor (SKPD terkait) dengan Non State Actor
- Keterlibatan Non State Actor dalam implementasi kegiatan yang ada pada SKPD terkait (sesuai jenis kegiatan)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

TANTANGAN DAN KENDALA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN RAD SDGs

1. Belum optimalnya komitmen semua pihak (Pemerintah, Akademisi, Filantropi dan Bisnis serta Non State) dalam implementasi SDGs.
2. Belum optimalnya koordinasi antara Pemprov dengan Kab/Kota
3. Belum tersedia regulasi Non State, Akademisi, Filantropi dan Bisnis untuk mendukung pelaksanaan dan penyampaian informasi dan laporan SDG's
4. Kurangnya pemahaman, pengetahuan ttg SDGs baik di Pemprov, Kab/Kota atau Non State
5. Tahun 2020-2021 terjadi Pandemi Covid-19, mengakibatkan Refocussing Anggaran, dan 2023 adanya DAU yang telah di tentukan
6. Terbatasnya SIPD untuk dapat melakukan tagging kegiatan yang mendukung SDGs sebagai sumber daya awal guna pengendalian, evaluasi dan pelaporan
7. Belum adanya insentif dan punishment bagi daerah dengan pencapaian pelaksanaan SDGs serta terhadap laporan capaian SDG's
8. Target SDGs terlalu banyak sehingga target pencapaian pembangunan menjadi bias dan tidak focus serta tidak sesuai dengan keunggulan dan potensi daerah
9. Terbatasnya ketersediaan data pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga menyulitkan dalam evaluasi dan pelaporan
10. Minimnya kegiatan pengendalian pelaksanaan SDGs dari Pemerintah Pusat kepada Daerah sebagai upaya penguatan advokasi kepada daerah
11. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang → harmonisasi Perkada melalui Kanwil Kemenkumham

REKOMENDASI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN RAD SDGs

1. Tersedia regulasi untuk Non State, Akademisi, Filantropi dan Bisnis untuk mendukung pelaksanaan dan penyampaian informasi dan laporan SDG's
2. Sosialisasi dan pengendalian dari Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan SDGs di daerah
3. Tersedianya menu dan laporan tagging kegiatan yang mendukung SDGs di SIPD RI
4. Capaian SDGs sebagai salah satu instrumen pemberian insentif kepada daerah
5. Dukungan ketersediaan data terutama dari BPS terutama pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Perlu adanya koordinasi dari Seknas SDGs ke Kementerian Hukum dan Ham terkait dengan pelaksanaan harmonisasi Perkada terutama Perkada Penetapan RAD SDGs

SEKRETARIAT SDGs PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA / JABATAN	HP / WA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT SDGs
1	Medi Iswandi, ST, MM Kepala Bappeda	0812 6102 6135	Ketua
2	Yudha Prima, S.STP, M.Si Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0811 6654 310	Sekretaris
3	Benny Ricardo, SE Fungsional Perencana Ahli Muda	0811 6682 279	Koordinator Program dan Kemitraan
4	Akky Perdana, ST Fungsional Perencana Ahli Muda	0812 6757 811	Koordinator Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
5	Rika Amir, SE, MM Fungsional Perencana Ahli Muda	0813 6311 8412	Koordinator Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan



TERIMAKASIH